

# MODEL MANAJEMEN JARINGAN SISTEM KEMITRAAN DALAM PENGEMBANGAN SLTP DAERAH TERPENCIL

Ismail Tolla

Universitas Negeri Makassar, Jl. A.P. Pettarani, Makassar  
BTN Minahasa Upa, Blok N.12 No.2 Makassar

**Abstract:** This study is intended to develop a model of Junior High School which can accommodate the teaching-learning needs of *SLTP* located in a remote area. The model is intended to be one which best utilizes the infrastructure and social resources or potential of the area. This study purposively selected the village of Leling in the sub-district of Kalumpang, Mamuju, South Celebes as the setting to carry out the exploration and action. The exploratory activities show that the selected area has the necessary resources to implement the model of *SLTP* using web-partnership management. This web-partnership management promotes the potential of the area so that the related parties are engaged in planning, implementing, and controlling the educational programs to achieve their shared goals. The model development activities realize the model consisting of organizational structure in the form of web the school elements or units of which, to reach the student home-base, are headed by a school associate principals. Within the context of village, the school associate principals are autonomous in their activities. Even though the model is established in view of maximizing the potential of remote areas, the model can also be transferred to different and not necessarily remote areas.

**Kata kunci:** manajemen jaringan, kemitraan, daerah terpencil.

Pengalaman yang perlu disimak dan dicermati pada negara-negara maju yang telah meraih keberhasilan dalam berbagai sektor pembangunan adalah pembangunan tidak dimulai dengan memproduksi barang-barang dalam jumlah yang besar dan mesin-mesin yang berdaya produktivitas tinggi, tetapi dimulai dengan fokus utama pada pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Implikasinya bahwa kualitas sumber daya manusia merupakan tumpuan utama bagi keberhasilan pembangunan suatu bangsa. Kepeka-an pemerintah Indonesia dalam memahami dan menyambut pengalaman strategis tersebut cukup positif yang diejawantahkan melalui wajib belajar secara bertahap dan berkelanjutan. Pada tahun 1984 dicanangkan wajib belajar tingkat SD dan setelah sepuluh tahun kemudian tepatnya 2 Mei tahun 1994 dicanangkan wajib belajar Tingkat SLTP. Secara konstitusional digulirkan pula undang-undang No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) dan beberapa perangkat peraturan sebagai petunjuk operasionalnya termasuk yang mengatur peran serta masyarakat dalam pendidikan, serta kebijakan-kebijakan strategis yang dituangkan ke dalam GBHN. Dalam GBHN 1993, kebijakan di bidang

pendidikan ditetapkan empat strategi dasar dalam memacu pembangunan di bidang pendidikan, yaitu pemerataan kesempatan, peningkatan relevansi, peningkatan kualitas; dan efisiensi pengelolaan pendidikan.

Kebijakan pemerataan pendidikan yang dilaksanakan melalui wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, tampaknya sulit dicapai terutama bagi daerah-daerah terpencil. Sejak dicanangkannya wajib belajar SLTP berbagai kendala telah teridentifikasi, baik dari segi biaya pembangunan sarana fisik sekolah maupun model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik daerah terpencil dengan tetap mengakomodasi nilai-nilai yang terkandung dalam keempat strategi dasar kebijakan tersebut.

Sementara itu, bila ditinjau dari kecenderungan Globalisasi, beberapa ahli telah mengemukakan pandangannya. Mukhopadhi (dalam Miarso, 1998) mengemukakan bahwa globalisasi telah memicu kecenderungan pergeseran dalam dunia pendidikan yang konvensional ke arah pendidikan yang lebih terbuka. Negara-negara maju yang telah mengembangkan model pendidikan terbuka, antara lain Prancis dengan model *learning without frontier*; Selandia Baru dengan model *correspondence learning*; dan Australia

dengan model *flexible learning*. Model-model pendidikan tersebut telah diamati oleh para ahli dari berbagai negara, seperti: Bishop (dalam Morse, 1998), Mason R (dalam Sangal, 1998). Hasil studi mereka menyimpulkan bahwa pendidikan masa mendatang akan lebih bersipat luwes, terbuka, dan dapat diakses oleh siapa saja yang memerlukannya tanpa pandang faktor jenis kelamin, usia, maupun pengalaman pendidikan sebelumnya. Pendidikan mendatang lebih ditentukan oleh jaringan, bukannya gedung sekolah.

Upaya pemerintah untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, PP No. 39 Tahun 1992, pasal 8 ayat (1) “menyatakan bahwa pemerintah menyebarluaskan informasi dan pengertian berkenaan dengan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk ikut berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan. Ayat (2) berbunyi bahwa pemerintah dan masyarakat perlu menciptakan peluang yang lebih besar untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam sistem pendidikan nasional.

Selanjutnya, kemitraan pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan yang lebih bersifat operasional diatur dalam pasal 6 dan pasal 10 PP No. 39 Tahun 1992. Pasal 6 berbunyi “peran serta masyarakat dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, dan badan yang bukan bagian dari pemerintah”. Pasal 10 menegaskan bahwa untuk memperlancar peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan nasional, pelaku peran serta masyarakat dapat mengadakan forum konsultasi, kerja sama, dan koordinasi antar penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan.

Ramelan (1997) mengemukakan tiga model kemitraan. Pertama, pihak swasta membangun dan mengoperasikan langsung infrastruktur, kemudian dialihkan kepada pemerintah setelah masa konsesi selesai. Kedua, *build operate own*, yaitu infrastruktur yang diadakan oleh pihak swasta dioperasikan sendiri. Dan ketiga, *build transfer operate build and transfer*, yaitu pihak swasta yang mengadakan fasilitas infrastruktur, kemudian diserahkan pengoperasiannya kepada pemerintah.

Model manajemen yang dipandang dapat mengakomodasi implementasi wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun adalah model manajemen yang menggunakan pendekatan *Community Participation in Planning and Management of Education Resource* atau Coplaner (Abin, 1994). Model pendekatan Coplaner secara filosofis merupakan suatu pendekatan perencanaan untuk menggalang partisipasi masyarakat sebagai mitra dalam pengembalian kebijakan pendidikan yang lebih luas untuk mendukung kegiatan pendidikan. Coplaner sebagai konsep strategis

untuk meningkatkan kemampuan perencanaan di daerah sejalan dengan penerapan konsep otonomi daerah (Tilaar, 1994). Coplaner diarahkan pada peningkatan kemampuan perencanaan, khususnya dalam memobilisasi sumber daya dan dana di kabupaten yang tentunya akan memasuki pula bidang-bidang kurikulum, evaluasi, dan berbagai bidang pendidikan lainnya.

Model pendekatan Coplaner secara substansial memiliki kesejajaran dengan konsep model manajemen jaringan sistem kemitraan (MJSK) yang dikembangkan dalam penelitian ini. Namun aplikasi konsep yang lebih operasional mempunyai perbedaan. Salah satu perbedaan yang substansial adalah mekanisme perumusan rencana pada Coplaner bersifat *top down and bottom up planning*, sedangkan konsep MJSK di samping pemerintah bekerjasama dalam perumusan rencana (*top down and bottom up planning*), justru masyarakat sebagai pelaku utama dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat dalam pelaksanaan program.

Kepentingan masyarakat untuk berpartisipasi dalam program pendidikan meliputi dua hal penting, yaitu (1) pelibatan dalam pembuatan kebijakan, dan (2) pelibatan langsung dalam pelaksanaan program sekolah. Sementara itu, pelibatan masyarakat dalam pembuatan kebijakan program pendidikan (sekolah) mencukupi tiga hal penting, yaitu (1) penentuan tujuan sekolah, (2) pembuatan perencanaan dan kebijakan, dan (3) pengorganisasian partisipasi masyarakat. Sedangkan dari segi pelibatan langsung dalam pelaksanaan program sekolah, masyarakat memiliki tanggung jawab dan kekuasaan tertentu yang dapat didelegasikan di luar persyaratan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, terutama mengenai perlengkapan fasilitas fisik, pemilihan kurikulum berbasis lingkungan, pengadaan tenaga guru, dan pembiayaan.

Selanjutnya, strategi pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan program sekolah terdiri dari tujuh cara, Sumption (1999). Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan program sekolah melalui *participation in planning, participation in policy making, participation in communication, participation in problem solving, participation in developing in the program, participation in financing, and participation in evaluating*.

Sementara itu, hasil-hasil penelitian yang relevan dengan kajian ini adalah sebagai berikut. Pertama, Hamidjojo dkk (1991) mengungkapkan bahwa manajemen sekolah dasar memberi andil determinatif terhadap pengelolaan aspek-aspek kehidupan sekolah. Kemampuan manajemen kepala sekolah merupakan faktor determinatif bagi penciptaan ling-

kungan sekolah yang kondusif bagi penyelenggaraan proses belajar mengajar yang pada gilirannya dapat meningkatkan produktivitas belajar. *Kedua*, Gaffar (1995) mengemukakan bahwa potensi masyarakat sangat besar, antara lain dalam bentuk kesadaran dan kebutuhan akan pendidikan yang makin meningkat; partisipasi lembaga keagamaan, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat cukup besar, serta kondisi ekonomi nasional yang makin baik sehingga muncul golongan masyarakat yang sangat kaya dan kelompok pengusaha/industri yang makin mapan. *Ketiga*, Abimanyu (1990) menyarankan bahwa pengelolaan SD terpendil perlu dilakukan dengan cara mengajar rangkap (*multigrade teaching*), strategi belajar-mengajar harus berpusat pada guru, kurikulum dan materi pelajaran harus disesuaikan, kesejahteraan guru perlu ditingkatkan, calon guru diambil dari daerah sekitarnya, dan peningkatan kesadaran orang tua siswa.

*Keempat*, Tolla (1994) menemukan pada umumnya orang tua siswa calon pendaftar SLTP daerah terpendil mempunyai kesadaran untuk menyekolahkan anaknya ke SLTP; namun karena harus meninggalkan desanya, timbul rasa keengganan yang disebabkan pertimbangan ekonomi. Pada umumnya anak usia SLTP di daerah terpendil merupakan mitra orang tua dalam mencari nafkah. Letak geografis dan pemukiman penduduk yang berpencar berjauh-jauhan merupakan masalah dalam hal mengkoordinasikan pendidikan. Dan budaya kerja secara gotongroyong yang masih amat kokoh dipelihara oleh masyarakat daerah terpendil merupakan suatu potensi bagi pengembangan pendidikan apabila dikoordinasikan secara efektif. Berdasarkan pertimbangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model manajemen jaringan sistem kemitraan pada SLTP daerah terpendil.

## METODE

Penelitian ini merupakan *research and development*. Pendekatannya menggunakan studi deskriptif-analitik dan kualitatif-analitik yang dilaksanakan melalui studi eksplorasi dan studi tindakan (*action research*) untuk pengembangan model. Teknik penelitian bersifat studi kasus dengan menetapkan secara *purposive* desa Leling kecamatan Kalumpang kabupaten Mamuju propinsi Sulawesi Selatan sebagai wilayah kasus pengembangan model. Prosedur pengembangan model terbagi dalam dua tahap, yaitu studi eksplorasi sebagai prakondisi persiapan pengembangan model, dan pengembangan model melalui studi tindakan. Langkah-langkah yang ditempuh untuk seluruh kegiatan penelitian meliputi studi

pralapanan, studi orientasi lapangan, penyusunan program kerja pengembangan model, implementasi pengembangan model, dan evaluasi dampak.

## HASIL

Potensi lingkungan eksternal dan internal yang mendukung pengembangan SLTP sebagai berikut. Sungai dan perahu motor katinting berfungsi sebagai sarana dan fasilitas transportasi. Pemerintah setempat dan seluruh lapisan masyarakat mendukung dan berkomitmen. Lembaga-lembaga sosial ekonomi masyarakat dan perorangan mendukung pembiayaan. Setiap dusun terdapat sarana dan fasilitas sosial yang dapat digunakan sebagai tempat pelaksanaan kegiatan proses pembelajaran. Kondisi ekonomi masyarakat pada umumnya memadai. Ada tenaga di masyarakat yang dapat dijadikan tenaga guru. Setiap dusun telah memiliki SD kecil. Jumlah lulusan SD setiap tahun cukup memadai. Kesadaran pendidikan masyarakat, terutama orang tua siswa untuk menyekolahkan anaknya ke SLTP cukup baik. Sikap proaktif pemerintah setempat dan tokoh-tokoh masyarakat dalam memprakarsai pengembangan SLTP cukup tinggi.

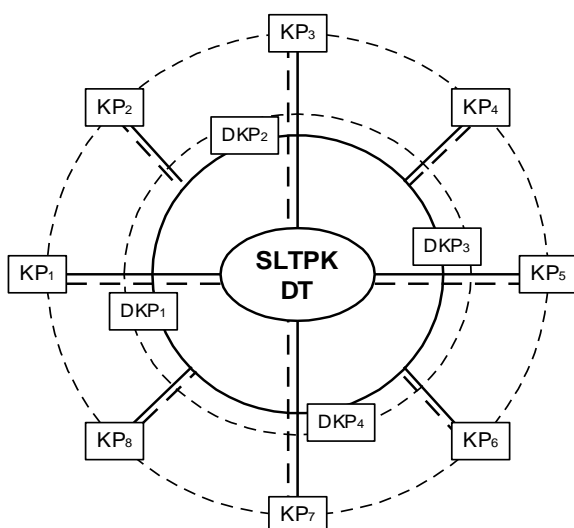
Kendala yang menonjol teridentifikasi dalam pengembangan SLTP Kemitraan Daerah Terpendil adalah ketersediaan tenaga di masyarakat yang dapat direkrut sebagai guru. Selain itu, umumnya keluarga lebih senang tinggal di kebun-kebun mereka.

Profil SLTP kemitraan daerah terpendil yang dikembangkan bernama SLTP Kemitraan (SLTPK) Daerah Terpendil. Karakteristik SLTPK sebagai berikut Manajemen SLTPK yang bersifat kebijakan umum dikendalikan secara sentralisasi oleh kepala SLTPK di kantor SLTPK, sedangkan yang bersifat teknis operasional sepenuhnya didelegasikan kepada Wakil Kepala SLTPK yang secara otonomi bertanggung di dusun penugasannya. SLTPK menggunakan dusun-dusun sebagai jaringan kelas pembelajaran yang secara teknis merupakan tanggung jawab fungsional wakil kepala SLTPK. Setiap dusun yang dijadikan sebagai jaringan kelas pembelajaran dipimpin oleh seorang wakil kepala sekolah sejumlah dengan dusun yang menjadi jaringan kelas pembelajaran; SLTPK menggunakan sistem guru rumpun. Penjadwalan pelajaran berdasarkan sistem blok target materi.

Struktur organisasi SLTPK terdiri atas tiga komponen. Badan Pembinaan SLTPK (BP SLTPK) yang keanggotaannya terdiri atas unsur pemerintah, konsultan SLTPK, dan unsur masyarakat berfungsi sebagai dewan penasehat untuk konsolidasi stabilitas, memberikan layanan konsultasi pengembangan

SLTPK, serta sebagai forum koordinasi masyarakat luas dan internal SLTPK, TU, dan siswa. Lembaga jaringan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan SLTPK bernama Forum Komunikasi Pembinaan Pendidikan (FKPP) tingkat desa dan Unit Forum Komunikasi Pendidikan (FKPP) tingkat dusun dengan fungsi utama mengerahkan dan mengkoordinasikan berbagai bentuk partisipasi masyarakat dan dalam penyelenggaraan SLTPK.

Hierarki hubungan dan kewenangan pengelolaan SLTPK sebagai berikut. Garis hubungan antara BP SLTPK dengan SLTPK dan FKPP bersifat koordinasi dan/atau konsultatif. Hubungan antara SLTPK dengan FKPP bersifat koordinasi fungsional. Secara hirarki garis komando kepala SLTPK berada dalam lingkup cakupan organisasi sekolah. Hirarki kewenangan FKPP mencakup UFKPP di dusun-dusun. Selanjutnya, secara operasional penerapan model SLTPK Daerah Terpencil disajikan pada Gambar 1.



**Gambar 1. Model SLTPK Daerah Terpencil**

Keterangan:

————— = Garis Manajemen

----- = Garis Koordinasi

DKP = Dusun Kelas Pembelajaran

KP = Kelas Pembelajaran

Gambar 1 menunjukkan bahwa SLTP dengan menggunakan dusun-dusun sebagai strategi jaringan pembelajaran merupakan karakteristik unik. Operasionalnya menyerupai jaring sarang laba-laba. SLTPK bertempat di kota desa, sementara kelas-kelas pembelajaran tersebar di dusun atau tempat tertentu yang layak. DKP1 s.d. DKP4 adalah dusun-dusun jaringan kelas pembelajaran. Sedangkan KP 1, 3, 5, dan 7

adalah pengembangan dari dusun-dusun bila diperlukan. Selanjutnya, KP 2, 4, 6 dan 8 merupakan penggabungan antar dusun yang tidak mampu (terutama kurang calon siswa). Dari segi strukturalisasi, DKP dan KP sejajar kedudukannya dalam garis komando kepala SLTPK, karena setiap DKP dan KP dikoordinir oleh seorang wakil kepala sekolah. Demikian juga dalam hal koordinasi, gambar menunjukkan garis koordinasi luwes yang berlangsung timbal balik, baik dengan kepala SLTPK, antar DKP, maupun antar KP. Dengan demikian, dapat dipertegas bahwa Gambar 1 termasuk proyeksi alternatif pengembangannya, karena yang dilaksanakan sesungguhnya hanya dua dusun.

## PEMBAHASAN

### Pengkajian Lingkungan

Luas wilayah desa Leling dibandingkan dengan jumlah penduduknya (5 orang perkilometer) merupakan aset bagi daerah ini. Selain memiliki wilayah yang cukup luas, juga subur untuk keragaman jenis tanaman pertanian dan perkebunan yang potensial untuk dibudidayakan. Selain potensi lahan pertanian dan perkebunan yang luas dan subur, daerah ini juga memiliki potensi sumber daya hasil hutan yang beranekaragam terutama berupa kayu olahan, rotan, dan damar. Potensi ini belum dapat optimal pemanfaatannya bagi peningkatan kesejahteraan penduduk, karena di samping memerlukan kualitas sumber daya manusia, juga memerlukan sentuhan teknologi untuk dapat berdaya jual tinggi bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan pendidikan. Dari segi sarana dan fasilitas sosial masyarakat, setiap dusun telah memiliki sarana dan fasilitas sosial berupa LKMD dan Balai Pertemuan Kelompok Tani yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat penyelenggaraan proses pembelajaran dalam upaya mengakomodasi kebutuhan belajar di setiap dusun, walaupun kondisinya masih sederhana dan kurang terawat. Respon pemerintah setempat dan masyarakat terhadap pendidikan cukup baik.

Kekuatan yang dipandang prospektif dalam kaitannya dengan kepentingan pendidikan adalah setiap dusun telah mempunyai SD kecil, ada tenaga guru SD, ada alumni perguruan tinggi terutama alumni IKIP dan IAIN di masyarakat yang masih menganggur yang dapat menjadi guru. Jumlah siswa di setiap SD memadai. Jumlah lulusan SD setiap tahun memadai. Pemerintah kabupaten dalam menyediakan buku ajar dan peralatan proses pembelajaran memberi dukungan. Motivasi lulusan SD melanjut-

kan ke SLTP cukup tinggi. Kesadaran orang tua menyekolahkan anaknya; daya beli siswa dalam membeli kelengkapan sekolah cukup tinggi.

Di samping dimensi kekuatan, faktor kelemahan yang masih memerlukan pembenahan lebih lanjut. Kelengkapan sarana dan fasilitas sosial yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat kegiatan proses pembelajaran masih relatif kurang. Tenaga guru yang digunakan khususnya alumni yang masih menganggur belum memiliki pengalaman mengajar yang memadai, sehingga masih memerlukan bimbingan dan pelatihan intensif dalam mempersiapkannya. Siswa umumnya tinggal di kebun bersama orang tuanya karena merupakan mitra orang tua dalam mencari nafkah sehingga kebanyakan waktu belajar berlangsung pada sore hari. Serta budaya membaca/belajar siswa masih rendah.

Untuk mengubah atau meminimalisasi tantangan dan kelemahan tersebut menjadi peluang dan kekuatan dalam pengembangan SLTPK, MSJK menerapkan strategi sebagai berikut. MSJK menggunakan dusun sebagai jaringan kelas pembelajaran, menggunakan sistem guru rumpun, penjadwalan sistem blok target materi pelajaran, dan waktu pembelajaran diatur secara lentur berdasarkan kesepakatan guru dan siswa. Keempat strategi tersebut secara simultan dapat mengoptimalkan dan mengakomodasi berlangsungnya proses pembelajaran secara efektif di daerah terpencil.

### **Pelaksanaan Program Kerja Pengembangan Model SLTPK**

MJSK merupakan suatu upaya pemberdayaan potensi sumber daya lingkungan dan masyarakat secara partisipatif, kolaboratif, dan bertumpu pada budaya lokal dalam pengembangan model SLTPK Daerah Terpencil. Hal ini sejalan konsep manajemen yang dikemukakan oleh Davis (dalam Gibson, dkk, 1998). Manajemen merupakan proses untuk menciptakan sebuah lingkungan atau organisasi dengan upaya-upaya yang terorganisasi untuk mencapai tujuan kelompok sebagai fungsi kepemimpinan eksekutif di mana-mana.

Kepala SLTPK sebagai penanggung jawab dalam pengelolaan akademik memegang kendali manajemen secara umum dalam penyelenggaraan SLTPK. Sedangkan manajemen yang bersifat operasional didelegasikan kepada para wakil kepala SLTPK. Wakil kepala SLTPK secara fungsional berperan sebagai koordinator penyelenggaraan proses pembelajaran di dusun-dusun jaringan kelas pembelajaran. Untuk mengefektifkan pelaksanaan tugas

wakil kepala SLTPK dalam mengkoordinasi jaringan kelas pembelajaran di setiap dusun, setiap dusun jaringan kelas pembelajaran dipimpin oleh seorang wakil kepala sekolah. Implikasinya bahwa jumlah wakil kepala sekolah dalam model SLTPK disesuaikan dengan jumlah dusun sebagai jaringan kelas pembelajaran.

Guru dengan potensi intelektualnya secara efektif dapat menjalankan proses pembelajaran sebagai guru rumpun, menerapkan penjadwalan sistem blok target materi pelajaran, dan berlangsung secara tatap muka. Indikator keberhasilannya teraplikasi pada peningkatan prestasi belajar siswa. Indikator prestasi belajar siswa, di samping prestasi rata-rata siswa mengalami peningkatan dalam setiap evaluasi hasil belajar, secara normatif teridentifikasi melalui frekuensi kehadiran dalam mengikuti pelajaran dan penyelesaian tugas-tugas dalam kegiatan proses pembelajaran.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

*Pertama*, MJSK bagi pengembangan SLTP daerah terpencil adalah suatu usaha pemberdayaan masyarakat untuk bekerja sama melalui jaringan sistem kemitraan partisipatif dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan program pendidikan untuk mencapai tujuan bersama. *Kedua*, karakteristik MJSK bersifat pemberdayaan, jaringan sistem kemitraan partisipatif, kolaboratif, dan berorientasi pada budaya lokal. *Ketiga*, model SLTPK daerah terpencil secara efektif dapat memfasilitasi kebutuhan belajar siswa dengan terimplikasi pada penggunaan sarana dan fasilitas sosial yang ada di masyarakat; penggunaan dusun-dusun sebagai jaringan kelas pembelajaran; jumlah wakil kepala sekolah disesuaikan dengan jumlah dusun yang dijadikan sebagai jaringan kelas pembelajaran; kewenangan Kepala Sekolah dalam penyelenggaraan SLTPK terbatas pada kebijakan umum dan pengendalian strategis; wakil kepala SLTPK mempunyai otonomi penuh di tingkat dusun; penjadwalan pelajaran disusun secara blok target materi pelajaran persemester; dan kegiatan pembelajaran berlangsung secara tatap muka. *Keempat*, struktur organisasi model SLTPK daerah terpencil secara operasional menyerupai jaringan laba-laba sebagai strategi untuk menjangkau kantong-kantong pemukiman penduduk/siswa yang berpencah berjangkau. Implikasinya, MJSK berpotensi untuk dikembangkan tanpa batas dalam menjangkau daerah-daerah yang terisolir.

## Saran

Dari segi pengembangan, diperlukan kaji-lanjut untuk penyempurnaan koridor sistem yang telah dikembangkan dalam penelitian ini. Salah satu kelemahan yang telah teridentifikasi adalah penyiapan tenaga guru yang mampu menjalankan tugas sistem guru rumpun pada tingkat SLTP. Dari segi penerapan,

pemberlakuan model SLTPK di daerah terpencil tidak hanya terbatas pada daerah terpencil, tetapi juga di perkotaan pada kantong-kantong pemukiman penduduk pinggiran kota yang belum terjangkau SLTP.

## DAFTAR RUJUKAN

- Abimanyu, S. 1994. *Kajian tentang Kebijakan, Pelaksanaan, dan Hasil-hasil Pendidikan dan Pengajaran Sekolah Dasar di Daerah Terpencil di Sulawesi Selatan*. Laporan penelitian tidak dipublikasikan. Ujung Pandang: Pusat Penelitian IKIP Ujung Pandang.
- Gaffar, M.F. 1995. *Studi Manajemen Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun*. Jakarta: Dirjen Pendidikan Menengah Umum, Depdikbud.
- Gibson, L.J. & Gigs, A.T. 2001. *Management Principles and Functions*. Boston: Homewood.
- Hamidjojo, S. 1993. *Masalah Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar*. Jakarta: Dirjen Dikti Depdikbud.
- Miarso, Y.H. 1998. *Teknologi untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan*. Jakarta: Depdikbud.
- Morse, A.G.D. 1998. *Cascade Method for the Transfer of Expertise in a Computer Assisted Telecommunications Network Planning Project*. Makalah pada The Fourth Symposium on Distance Education and Open Learning, Bandung, 12-13 Mei 1998.
- Ramelan, R. 1997. *Kemitraan Pemerintah-Swasta dalam Pembangunan Infrastruktur di Indonesia*. Jakarta: Koperasi Jasa Profesi LPPN.
- Sangal, S.S. 1998. *Open and Flexible Acces to Learning Experiences of India in Open Schooling*. Makalah pada The Fourth Symposium on Distance Education and Open Learning, Bandung, 12-13 Mei 1998.
- Sumption, M.R. & Ivonne, E. 1999. *School-Community Relations a New Approach*. New York: McGraw-Hill Book Company.
- Tilaar, H.A.R. 1994. *Manajemen Pendidikan Nasional: Kajian Pendidikan Masa Depan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Tolla, I. 1996. *Identifikasi Perhatian Orang Tua Siswa Enrolment SLTP pada Berbagai Daerah Terpencil di Sulawesi Selatan*. Laporan penelitian tidak diterbitkan. Ujung Pandang: Pusat Penelitian IKIP Ujung Pandang.